

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Gajah

###### a. Wilayah Geografis

Berdasarkan letak geografis, desa Gajah adalah desa yang berada di wilayah kecamatan Gajah, kabupaten Demak, provinsi Jawa Tengah. Desa Gajah memiliki Luas 283 Ha, memiliki batas wilayah, diantaranya:<sup>1</sup>

1. Sebelah timur : Desa Sari, Kecamatan Gajah
2. Sebelah selatan : Desa Boyolali, Kecamatan Gajah
3. Sebelah barat : Desa Sedo Kecamatan Demak
4. Sebelah utara : Desa Ngaloran Kecamatan Karanganyar

Adapun letak geografis kecamatan Gajah dengan kabupaten Demak berjarak kurang lebih 10 Km.

Secara administratif wilayah desa Gajah terdiri dari 24 RT dan 5 RW. Desa Gajah merupakan daratan rendah dengan luas 283 Ha, terdapat banyak areal persawahan dan sungai yang membentang sepanjang jalan. Iklim desa Gajah sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu iklim tropis dan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Berdasarkan iklim yang dimiliki, sumber daya alam desa Gajah adalah sektor pertanian karena mempunyai pengaruh langsung dengan aktifitas pertanian dan pola tanam di desa tersebut. Di desa Gajah dijumpai banyak areal persawahan, karena daerah dan iklimnya lebih cocok dijadikan tempat tanaman padi.

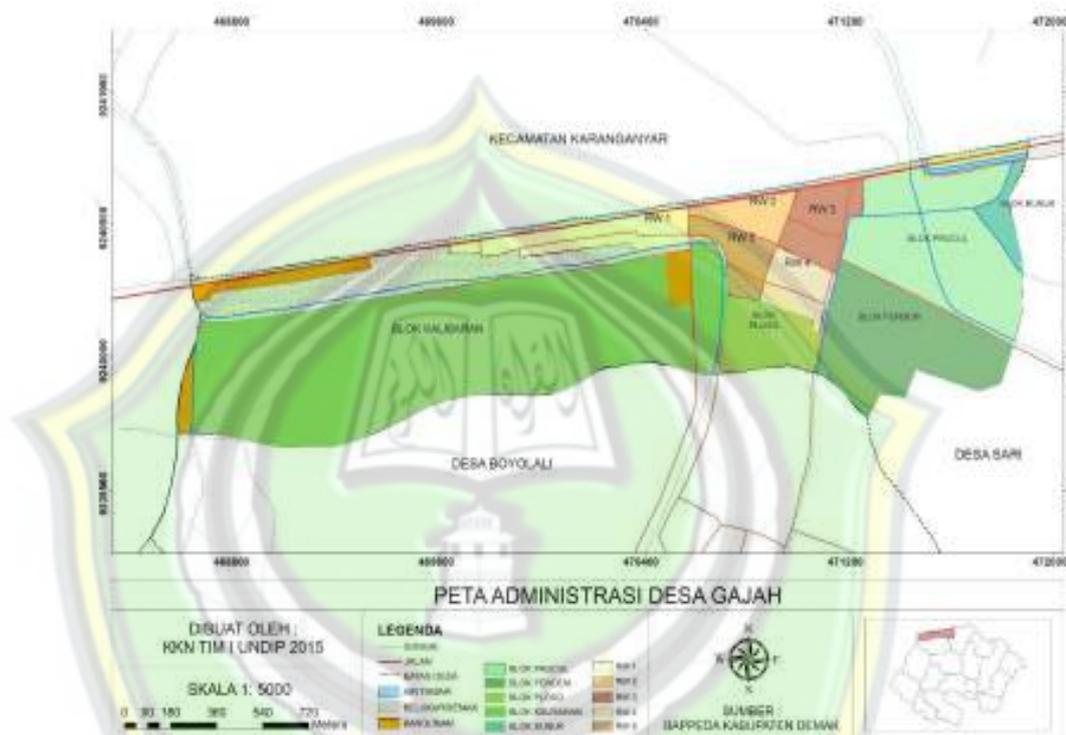
Luas daerah Desa Gajah adalah 283 Ha. Areal ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga desa untuk kepentingan

---

<sup>1</sup>Dokumentasi Desa Gajah, tanggal 10 maret 2017.

hidup mereka. Hal ini memberikan banyak manfaat, dan dijadikan salah satu sumber mata pencaharian.

**Gambar 4.1** peta Desa Gajah



Sumber: Profil desa

#### b. Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa Gajah, jumlah penduduk desa Gajah sampai akhir bulan Februari 2017 tercatat secara administrasi berjumlah 4004 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1247. Penduduk laki-laki berjumlah 2040 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 1964 jiwa. Komposisi penduduk desa Gajah berdasarkan jenis kelamin ini dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Dokumentasi Desa Gajah, tanggal 10 Maret 2017.

**Tabel 4.1**  
**Komposisi Penduduk Desa Gajah Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Dan Kepala Keluarga**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Kepala Keluarga
1	Laki-laki	2040	988
2	Perempuan	1964	259
Jumlah		4004	1247

Sumber: profil desa

### c. Agama

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, ras dan budaya, adat istiadat dan agama. Agama-agama yang secara formal diakui pemerintah Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha. Keberadaan agama-agama tersebut dijamin oleh UUD 1945 pasal 29 dan penjelasannya yang dengan tegas menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Atas dasar konstitusional ini, maka semua agama dapat hidup dan berkembang dibawah lindungan Negara

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat desa Gajah secara keseluruhan adalah agama Islam. Komposisi penduduk desa Gajah berdasarkan agama yang dianut dapat di lihat dalam tabel 4.2:<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Dokumentsi Desa Gajah, tanggal 10 Maret 2017

**Tabel 4.2**  
**Komposisi Penduduk Desa Gajah Berdasarkan Agama**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	2034	1952
2	Kristen	5	12
3	Katholik	1	0

Sumber: profil desa

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan masyarakat desa Gajah beragama Islam dengan jumlah peemeluk sebanyak 2034 orang. Di desa ini terdapat 12 musalla dan 1 masjid. Kehidupan beragama masyarakat di desa Gajah cukup baik, hal tersebut bisa terlihat dengan jumlah jamaah yang menghadiri tempat ibadah pada tiap-tiap waktu shalat cukup banyak. Di samping itu, terdapat beberapa majlis taklim ibuk-ibu dan para remaja yang selalu aktif mengadakan acara-acara keagamaan. Sedangkan untuk anak-anak, terdapat tempat belajar mengaji yang diadakan di rumah guru-guru ngaji yang rutin mengadakan belajar membaca al-Qur'an setiap hari.

#### **d. Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat

mempertajam sistematika fikir atau pola fikir individu. Selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.<sup>4</sup>

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Gajah jumlah angka putus sekolah serta jumlah siswa menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Komposisi Penduduk Desa Gajah Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	348	345
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	217	201
3	SLTP/SEDERAJAT	451	551
4	SLTP/SEDERAJAT	436	386
5	SLTA/DESERAJAT	472	370
6	DIPLOMA I/II	5	5
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	26	29
8	DIPLOMA IV/STRATA-I	72	73
9	STRATA-II	12	4
10	STRATA-III	1	0

Sumber: profil desa

<sup>4</sup> Dokumentasi Desa Gajah, tanggal 10 Maret 2017.

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa prosentase tingkat pendidikan penduduk desa Gajah terkecil adalah STRATA-III dimana hanya terdapat 1 orang dari keseluruhan penduduk.

Pada saat ini, seiring dengan pola pikir penduduk yang lebih maju, maka kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan secara umum terus meningkat. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari semakin besarnya jumlah murid yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### e. Pekerjaan

Penduduk desa Gajah mempunyai mata pencaharian yang beragam. Sebagian besar sumber mata pencaharian desa Gajah adalah Sektor dari Petani. Petani merupakan sumber mata pencaharian yang utama di desa Gajah, penduduk desa tersebut ada yang sebagi pedagang, guru dan lain-lain. Jenis pekerjaan ini dapat dilihat pada tabel 4.4.<sup>5</sup>

**Tabel 4.4**

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

**Tabel 4.4**

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	454	392	846
2	Mengurus Rumah Tangga	0	312	312
3	Pelajar/Mahasiswa	421	3455	766
4	Pensiun	18	10	28
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	33	23	56
6	Tentar Nasional Indonesia (TNI)	4	0	4
7	Kepolisian RI (POLRI)	5	0	5
8	Pegadaian	35	58	93

<sup>5</sup> Dokumentasi Desa Gajah, 10 Maret 2017.

9	Petani/Pekebun	123	153	276
10	Industri	1	2	3
11	Konstruksi	1	0	1
12	Transportasi	1	0	1
13	Karyawan Swasta	109	59	168
14	Karyawan Bumn	1	0	1
15	Buruh Harian Lepas	5	3	8
16	Buruh Tani/Perkebunan	2	6	8
17	Pembantu Rumah Tangga	0	1	1
18	Tukang Batu	1	0	1
19	Tukang Kayu	1	0	1
20	Tukang Jahit	5	0	5
21	Seniman	0	1	0
22	Ustadz/Mubaligh	2	0	2
23	Dosen	3	0	3
24	Guru	14	17	31
25	Pengacara	1	0	1
26	Bidan	0	2	2
27	Perawat	1	4	5
28	Pelaut	1	0	1
29	Sopir	42	0	42
30	Pedagang	52	116	168
31	Perangkat Desa	6	2	8
32	Kepala Desa	1	0	1
33	Wiraswasta	662	439	1101
34	Pekerjaan Lainnya	34	18	52

Sumber: profil desa

Berdasarkan tabe 4.4 diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa Gajah bekerja sebagai wiraswasta dan petani/pekebun, wiraswasta laki-laki sebanyak 662 dan perempuan sebanyak 439, dan petani/pekebun laki-laki sebanyak 123 dan perempuan sebanyak 153. Hal ini disebabkan karena tersedianya lahan persawahan yang luas di daerah tersebut.

#### f. Pemerintahan Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, desa Gajah telah sejak lama memberikan pelayanan antara lain berupa pencatatan sipil/surat-surat keterangan perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik. Selain itu guna memenuhi persyaratan administrasi perjanjian, juga secara rutin telah memberikan surat keterangan usaha kepada warga masyarakat desa maupun pihak lain yang akan membuka usaha di desa Gajah. Pengadministrasian juga telah dilakukan dengan baik, meskipun telah dilakukan penyempurnaan/perbaikan demi kepentingan kearsipan.

Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di desa Gajah sudah tersedia pasar desa. Sedangkan untuk masalah ketentraman dan ketertiban desa menjadi prioritas desa Gajah. Hal itu dikarenakan dengan terjaminya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat. Kerukunan/kegotong royongan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat desa Gajah dan sekitarnya. Kesemuanya itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa Gajah.<sup>6</sup>

**Tabel 4.5**

#### **Nama Penjabat Wilayah Administrasi Desa Gajah**

No	Nama	Jabatan
1	Masrukhin	Kepala Desa
2	Eko Supargiono	Pelaksana tekhnis-jogoboyo
4	Mursidi	Moden

<sup>6</sup> Dokumentasi Desa Gajah, tanggal 10 Maret 2017.

5	Kenang Suyanto	Ulu-ulu
6	Drs. Munjahid	Sekretaris Desa
7	Rahamad Mulyono	Kaur Pemerintahan dan Umum
8	Aries Hergianto	Staf
9	Sutowo	Kaur Pembangunan dan Kesra
10	Sundari	Staf
11	Jazuli iksan	Kaur Keuangan
12	Fitri Rusdiyana Tsani	Staf

Sumber: profil desa

## 2. Gambaran Umum Program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Desa Gajah.

Program pemerintah atau yang sering dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat, masuk ke desa Gajah dan dibentuk mulai tanggal 9 Oktober 2003 dalam Musyawarah Antar Desa (MAD II) yang pada waktu itu masih bernama PKK. Salah satu pelaku program tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan program pemerintah atau yang sering dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat perdesaan adalah unit pengelola kegiatan (UPK), Unit Pengelola Kegiatan bertanggung jawab kepada forum MAD dan juga pelaksanaan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran sebagai upaya menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.<sup>7</sup>

Program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebagai salah satu program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup

<sup>7</sup> Leeflat Profil PNPM Mandiri dan UPK Kecamatan Gajah.

masyarakat perdesaan. Mutlaknya keterlibatan masyarakat langsung dalam seluruh proses kegiatan pemberdayaan masyarakat ini yang dimulai dari kegiatan sosialisasi, penggalan gagasan, penetapan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan, mengharuskan pula adanya keterlibatan banyak pelaku sebagai pelaksana program, baik pelaku tingkat desa maupun tingkat kecamatan.

Di desa Gajah sendiri program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) berupa pinjaman modal bagi masyarakat yang mempunyai usaha produktif untuk mengembangkan usahanya.<sup>8</sup>

Nama-nama kepengurusan UPK Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gajah, dan nama-nama kepengurusan kegiatan SPP desa Gajah antara lain:<sup>9</sup>

**Tabel 4.6**

**Nama Kepengurusan UPK Pemberdayaan Masyarakat  
Kecamatan Gajah Tahun 2017**

No	Nama	Jabatan
1	Adib Muktar, SE	Ketua
2	Ali Rahmadin	Sekretaris
3	Latifun Nuha	Bendahara I
4	Nur Heni Habsari, S.Pd SD	Bendahara II

Sumber data: Arsip UPK Kecamatan Gajah

<sup>8</sup> Observasi SPP Desa Gajah, tanggal 12 Januari 2017.

<sup>9</sup> Dokumentasi SPP Desa Gajah, tanggal 14 Maret 2017.

**Tabel 4.7**  
**Nama Kepengurusan Kegiatan SPP Desa Gajah**  
**Tahun 2017**

No	Nama	Jabatan
1	Sri Nuryati	Ketua
2	Hartati	Sekretaris
3	Siti Sundari	Bendahara

Sumber data: Arsip SPP Desa Gajah

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Data Penerapan Kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan).**

Pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri memiliki dua program utama yaitu, pengembangan fisik dan pengembangan ekonomi melalui permodalan. Kemudian salah satu pengembangan ekonomi yang dilakukan di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ini merupakan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggambarkan penerapan dari Simpan Pinjam Perempuan. Secara khusus dan secara umum peneliti menggambarkan penerapan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM di Desa Gajah. Dalam pengelolaannya pemerintah membuat suatu program yang tujuannya yaitu menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.<sup>10</sup>

Program ini dinamakan “SPP” yaitu salah satu dari program kerja pemberdayaan masyarakat. Penambahan permodalan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dari data yang peneliti dapatkan dari Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Gajah, pada tahun 2015-2017 tercatat tahun 2015 sebesar Rp.440.500.000 pada tahun 2016 sebesar Rp.127.000.000 dan pada tahun 2017 tercatat dengan pinjaman sebesar Rp.199.000.000.

<sup>10</sup>Data Laporan SPP Tahun 2014, 2015 dan 2016

Daftar kegiatan yang sudah dijalankan program nasional pemberdayaan masyarakat di Desa Gajah sampai saat ini bisa dilihat pada table berikut:<sup>11</sup>

**Tabel 4.8**  
**Kegiatan SPP Desa Gajah**

Tahun	Program
2014	Pelatihan boga Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
2015	Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Santunan Anak Yatim
2016	Simpan pinjam Perempuan (SPP)
2017	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

**a. Kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM Desa Gajah**

Jika dilihat dalam perspektif Islam tujuan jasa “Pinjaman Kelompok” adalah tujuan yang mulia, namun yang menjadi permasalahan adalah penambahan pengembalian yang terjadi. Penambahan yang diambil pihak kreditur dalam jasa pinjamannya walaupun disepakati masyarakat sendiri, namun harus diketahui apakah hukumnya. Islam melarang keras hukumnya riba. Namun apakah bunga atau penambahan jasa pinjaman tersebut merupakan riba atau bukan hal inilah yang sering menjadi perbincangan para ulama Islam. Apalagi ini demi kesejahteraan masyarakat dan sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat.

Dalam pengelolanya pemerintah membuat suatu program yang tujuannya yaitu menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Program ini dinamakan “SPP” yaitu salah satu dari

<sup>11</sup> Hasil Observasi Desa Gajah, tanggal 15 Maret 2017.

program kerja pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat

Dalam menjalankan suatu program dibutuhkan orang sebagai motor penggerak pelaksanaan program tersebut, mulai dari perencanaan kegiatan hingga tahap evaluasi hasil kegiatan yang telah dijalankan. Pelaksana kegiatan SPP desa adalah meliputi:<sup>12</sup>

1) Kepala Desa

Peran Kepala Desa adalah sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan SPP.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan kegiatan SPP, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi dari proses setiap tahapan kegiatan SPP, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian desa

3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Desa Sosialisasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desaan mengelola administrasi, serta keuangan SPP.

4) Tim Penulis Usulan (TPU)

Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan

5) Tim Pemantau

Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah Tim Anggota Pemantau sesuai dengan dengan kesepakatan saat musyawarah.

6) Tim Pemelihara

Tim Pemelihara berberan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Sundari, bendahara SPP, 15 Maret 2017.

perencanaan kegiatan dan pelaporan. Keanggotaanya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota Tim Pemelihara sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah.

7) Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan SPP, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Di desa Gajah masyarakat terdiri dari kelompok SPP, kelompok posyandu, kelompok arisan.

**b. Alur Penerapan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Desa Gajah.**

Alur penerapan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) meliputi: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelestarian.<sup>13</sup>

1) Tahap perencanaan

Pada tahap perencanaan kegiatan SPP yang dilaksanakan meliputi:

a) Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi

MAD sosialisasi dilaksanakan di tingkat kecamatan dengan perwakilan 6 orang perdesa yang meliputi: kepala desa, 2 orang BPD, 3 orang tokoh masyarakat. Dalam MAD sosialisasi disampaikan dengan tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan SPP.

b) Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi

Setelah dilakukan MAD sosialisasi, kegiatan selanjutnya yaitu Musdes Sosialisasi. Pada acara Musdes disampaikan tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lainnya yang telah disampaikan di MAD Sosialisasi.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Sundari, Bendahara SPP dan dokumentasi SPP, tanggal 15 Maret 2017.

c) Penggalian Gagasan

Dalam penggalian gagasan dilakukan pemetaan masyarakat yang belum produktif, hal ini dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan kereteria yang mendekati kenyataan tentang kelompok sasaran kegiatan. Setelah itu diadakan musyawarah pengalihan gagasan yang akan memunculkan usulan-usulan RT/RW atau kelompok yang nantinya akan diusulkan kepada MKP.

d) Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)

MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa. Dalam kegiatan ini disepakati usulan kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP), serta dipilihnya tiga orang wakil perempuan untuk hadir dimusyawarah antar desaprioritas ada 2 orang sebagai Tim Penulis Usulan.<sup>14</sup>

e) Musyawarah Desa Perencanaan (Musdes Perencanaan)

Pada Musdes perencanaan ditetapkan satu usulan kegiatan sarana dan prasarana dasar atau peningkatan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi.

f) Penulisan Usulan Desa

Setelah usulan-usulan kegiatan SPP dibahas dalam MKP dan Musdes perencanaan, tahap selanjutnya adalah penulisan usulan desa. Usulan desa dibuat dalam bentuk proposal.

g) Verifikasi Usulan

Verifikasi Usulan dilaksanakan dengan tujuan memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa yang didanai program pemerintah, aspek penilaian dilihat dari kelayakan

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Sundari, Bendahara SPP dan dokumentasi SPP, tanggal 15 Maret 2017.

usulan, swadaya, partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat yang belum produktif dalam kegiatan tersebut.

## 2) Tahap Pelaksanaan

### a) Persiapan pelaksanaan

Pengurus TPK bersama Kepala Desa mengadakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan yang didampingi oleh KPMD menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalanya.

### b) Pelaksanaan

Pelaksana kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan Mudes Informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan, tahap pelaksanaan berupa penyaluran Dana pinjaman.

### c) Musdes Pertanggung Jawaban

Musdes Pertanggung Jawaban dilaksanakan tiga kali selama pelaksanaan kegiatan. Musdes ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat.

### d) Dokumentasi Kegiatan

Seluruh kegiatan dari kegiatan SPP harus didokumentasikan oleh fasilitator kecamatan. Meskipun demikian, untuk kepentingan desa dan kecamatan, maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumentasi kegiatan.

### e) Penyelesaian Kegiatan

#### 1) Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) memuat pernyataan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (100%) serta siap diperiksa oleh PJOK. Untuk kegiatan SPP (yang dananya ada pada masyarakat) pelaporannya hanya sampai dengan tanggal dibuatnya laporan.

## 2) Realisasi Kegiatan dan Biaya

Untuk kejelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan dilapangan serta penggunaan dana bantuan dari program pemerintah, TPK bersama KPMD yang dibantu oleh fasilitator kecamatan harus membuat rincianrealisasi kegiatan dan biasaya beserta rekapitulasinya.

## 3) Musyawarah Desa Serah Terima

Merupakan bentuk pertanggung jawaban seluruh pengelolaan Dana dan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat setelah pekerjaan atau kegiatan selesai dilaksanakan.

## 4) Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

Secara resmi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dinyatakan telah selesai jika telah diserahterimakan kepada masyarakat dalam musyarwarah desa dan setelah ditandatangani SP3K oleh ketua TPK dan PJOK serta diketahui Kepala Desa.

## 5) Pembuatan Dokumentasi Penyelesaian

Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan, laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan, rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung lainnya.

## 3) Tahap pelestarian

Pada tahap ini merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukantahapan pelestarian masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip program pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Tim Pelestarian di Desa Gajah dibentuk pada saat musyawarah desa serah terima, dibentuk sesuai dengan kegiatan

yang sudah dilaksanakan. Pada setiap kegiatan ada 3 orang yang ditunjuk sebagai Tim Pelestari Kegiatan.<sup>15</sup>

## 2. Data dampak penerapan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM upaya mengurangi pengangguran.

Adapun dampak dari penerapan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) setelah adanya program PNPM mandiri perdesaan, dan setelah masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan program sarana sebagian besar dari mereka bisa memenuhi kebutuhan karena didukung sarana sebelumnya, dan sebagian masyarakat yang ikut terlibat SPP digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Jika dilihat dari masih besarnya jumlah angka pengangguran atau yang tidak bekerja di Desa Gajah memiliki angka yang cukup tinggi.

Angka pengangguran bisa dilihat pada table 4.9:

**Tabel 4.9**

### **Jumlah Penduduk Desa Gajah berdasarkan Angka pengangguran**

Tahun	2015	2016	2017
Pengangguran atau tidak bekerja	976	897	846

Sumber: Profil Desa

Pada tahun 2015 angka pengangguran di Desa Gajah berjumlah 976 jiwa, di tahun 2016 angka pengangguran turun menjadi 897 jiwa. Dan di tahun 2017 angka pengangguran menurun menjadi 846 jiwa.

SPP (Simpan Pinjam Perempuan) memperoleh alokasi dana BLM pada tahun 2016 sebesar 127.000.000 dan tahun 2017 sebesar 199.000.000.<sup>16</sup>

Keterlibatan pemerintahan dalam menyikapi fenomena pengangguran sangatlah strategis dengan menempuh kebijakan yang

<sup>15</sup> Pedoman Umum PNPM Mandiri

<sup>16</sup> Dokumentasi SPP dan Profil Desa Gajah.

dapat menjadikan program secara terpadu. Termasuk didalamnya upaya mengurangi pengangguran. Untuk mengatasi keadaan ini pemerintah pada era sekarang dan sebelumnya telah melakukan berbagai usaha dalam rangka pengentasan masyarakat dari pengangguran dan kemiskinan.usaha tersebut terlihat dalam berbagai program simpan pinjam perempuan alokasi dana BLM.

Program simpan pinjam perempuan merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Wawancara pengelola anggota SPP dirasa sangat membantu, pada tahun 2010 Ibu Sri Lestari anggota KSP Lestari pada tahun 2010 mengikuti program yang awalnya meminjam untuk mengembangkan usahanya, ibu Sri Lestari sudah merekrut tetangganya yang tidak bekerja.<sup>17</sup>

Dalam peminjaman dana SPP tidak memberikan jaminan kepada UPK seperti pada bank, pelaksanaan SPP di desa Gajah sudah sesuai dengan apa yang ada di buku pedoman. Dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman SPP sangatlah mudah tanpa ada jaminan.

Calon peminjam yang bergabung dengan kelompok lestari mengajukan permohonan pinjaman Dana kepada unit pengelola kegiatan. Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pinjaman Dana SPP ialah:<sup>18</sup>

- a. Warga desa Gajah
- b. Mempunyai Ktp/foto copy Ktp
- c. Memiliki usaha yang sudah berjalan maupun belum berjalan
- d. Mengajukan permohonan

Bagi kelompok lestari yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria akan mendapatkan pinjaman jumlah besaran pinjaman yaitu pinjaman minimum sebesar Rp. 2.000.000,- dan maksimum sebesar Rp.10.000.000,-

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ibu Sri Maryati, Anggota SPP, tanggal 02 Maret 2017

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Sundari, Bendahara Spp, tanggal 15 Maret 2017

Masyarakat percaya adanya program SPP yang memberikan Dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kaum perempuan. Pinjaman dana SPP di desa Gajah berjalan cukup baik, walaupun terkadang terjadi tunggakan tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan batas waktu maksimal pembayaran.<sup>19</sup>

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan sumber daya yang penting. masyarakat miskin atau menganggur di anggap berdaya apabila mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya melalui sumber daya (SDM).<sup>20</sup> Perubahan nyata dapat dirasakan oleh pemanfaatan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yakni perempuan yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan kini memiliki pekerjaan.<sup>21</sup>

Masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman dana SPP yang sudah didapat dengan baik, melalui pinjaman dana SPP tersebut bisa mengurangi angka pengangguran, salah seorang anggota dirasa sangat membantu mengembangkan usahanya dan bisa membantu mengurangi pengangguran.<sup>22</sup>

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Penerapan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM**

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis tentang penerapan program SPP dalam upaya mengurangi pengangguran. Jika dilihat dari fiqih muamalah belum sesuai dengan ketentuan Islam, karena bentuk kerjasamanya masih menggunakan sistem konvensional. Dimana bunga sebagai balas jasanya. Jika dilihat dari tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah untuk masyarakat menjadi

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Sundari, Bendahara Spp, tanggal 15 Maret 2017.

<sup>20</sup> Ismawan, Sukses di Era Ekonomi Liberal Bgi Koperasi dan Perusahaan Keccil-Menengah, Jakarta, Grasindo, 2001, hlm.15.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Ibu Sri Maryati, Anggota SPP, tanggal 02 Maret 2017.

<sup>22</sup> Wawancara ibu Jujuk Nur Janah, Anggota SPP, tanggal 10 Maret 2017.

masyarakat yang produktif melalui kemandirian, pinjaman kelompok (SPP) ini bisa lebih meringankan pelaku usaha yang meminjam Dana bergulir tersebut.

Karena pada prinsipnya dalam ekonomi Islam jika seseorang meminjam sesuatu baik itu berupa uang atau barang kepada orang lain, maka orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kelebihan dari nilai pinjaman tersebut kecuali pihak peminjam melebihkan sebagai tanda terima kasih.

Penambahan permodalan simpan pinjam kelompok yang tercatat sebagai anggota SPP dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pemerintah melalui kegiatan SPP dinilai sangat membantu.

Namun disayangkan banyak diantara anggota kelompok yang ternyata bukan termasuk masyarakat yang belum mempunyai usaha produktif. Alasan yang dapat disampaikan dari pelaksana kegiatan adalah jika masyarakat yang belum memiliki usaha produktif diberikan pinjaman maka proses pengembalian nantinya akan terjadi kendala. Jadi yang diberikan pinjaman merupakan masyarakat yang mempunyai usaha produktif (memiliki usaha).

Alur kegiatan yang dijalankan oleh program pemerintah di desa Gajah dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Mencerminkan terlaksananya beberapa prinsip program SPP antar lain:

Pertama, prinsip demokrasi telah dijalankan dengan baik melalui pengambilan keputusan masyarakat secara musyawarah dan terarah.

Kedua, prinsip partisipasi masyarakat. Karena partisipasi merupakan salah satu penentu dalam penilaian saat verifikasi usulan, masyarakat desa Gajah berperan secara aktif dalam alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberi pinjaman dana.

## 2. Dampak Penerapan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM upaya mengurangi pengangguran

Kurangnya dana untuk permodalan usaha akan menghambat perkembangan usaha yang telah dilakukan, sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Akibatnya bila tidak segera diatasi akan menjadi keterpurukan ekonomi yang menimbulkan pengangguran, bahkan bisa menjadi kemiskinan.

Proses pelaksanaan kegiatan SPP dimulai dari pengajuan proposal yang dilengkapi dengan foto copy KTP dan KK, dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi kelompok yang bertujuan untuk menilai apakah calon peminjam layak untuk menerima pinjaman dana atau tidak, dan proses terakhir yaitu pencairan dana. Dengan persyaratan yang mudah hanya dengan foto copy KTP dan KK tanpa ada jaminan apapun.

Oleh karena itu penerapan SPP (simpan pinjam perempuan) lebih berdampak positif dibanding dampak negatifnya bagi masyarakat. Adapun dampak positif yang dirasakan masyarakat angka pengangguran tahun 2015 sebanyak 976 di tahun 2017 angka pengangguran meurun menjadi 846 jiwa.

Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Ismawan bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapat dan memanfaatkan akses atas sumber daya. Masyarakat miskin atau menganggur dianggap berdaya apabila mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan kemampuan permodalan dan pengembangan usaha.<sup>23</sup> Dengan adanya program ini membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya untuk lebih berkembang, karena ketidakmampuan masyarakat memenuhi hak-hak dasar, seperti

---

<sup>23</sup> Ismawan, Sukses di Era Ekonomi Liberal Bgi Koperasi dan Perusahaan Keccil-Menengah, Jakarta, Grasindo, 2001, hlm. 15.

terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi serta rendahnya produktifitas dan tingkat pembentukan modal bagi masyarakat.

